

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PERIKANAN**



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I

**TAHUN ANGGARAN
2025**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antar lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelola keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan berbasis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Ambon, 14 Juli 2025

Kepala Pengguna Anggaran

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 19780427 200312 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
D. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	4
Tabel 2 : Ringkasan Neraca	5
Tabel 3 : Ringkasan Laporan Operasional	6
Tabel 4 : Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	7
Tabel 5 : Data Pegawai BPPP Ambon	12
Tabel 6 : Penggolongan Kualitas Piutang	23
Tabel 7 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	25
Tabel 8 : Perubahan Pagu Anggaran BPPP Ambon	28
Tabel 9 : Rincian Realisasi Anggaran	29
Tabel 10 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	30
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Pendapatan	31
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	32
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja	33
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Pegawai	34
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Barang	35
Tabel 16 : Rincian Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19	36
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal	37
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung dan Bangunan	39
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung	40
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan & Jembatan	41
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	41
Tabel 24 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	43
Tabel 25 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	44
Tabel 26 : Piutang Bukan Pajak	44
Tabel 27 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45
Tabel 28 : Rincian Persediaan	46
Tabel 29 : Rincian Saldo Tanah	46
Tabel 30 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin	47

Tabel 31	: Rincian Saldo Gedung dan Bangunan	48
Tabel 32	: Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan	49
Tabel 33	: Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya	49
Tabel 34	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	50
Tabel 35	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	50
Tabel 36	: Rincian Aset Lain-lain	51
Tabel 37	: Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	51
Tabel 38	: Rincian Utang Pihak Ketiga	52
Tabel 39	: Rincian Utang yang belum Ditagihkan	52
Tabel 40	: Rincian Uang Muka dari KPPN	53
Tabel 41	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	53
Tabel 42	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	55
Tabel 43	: Rincian Beban Pegawai	57
Tabel 44	: Rincian Beban Persediaan	58
Tabel 45	: Rincian Beban Barang dan Jasa	58
Tabel 46	: Rincian Beban Pemeliharaan	59
Tabel 47	: Rincian Beban Perjalanan Dinas	60
Tabel 48	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	61
Tabel 49	: Rincian Kegiatan Non Operasional	62
Tabel 50	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	66



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAN: www.bp3ambon-kkp.org, Email : bppp_ambon@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (*An-audited*) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 14 Juli 2025



Kuasa Pengguna Anggaran,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 19780427 200312 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara selama periode Semester I TA. 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp530.247.008,00 atau mencapai 64,76 persen dari estimasi pendapatannya senilai Rp818.828.000,00.

Realisasi Belanja Negara selama periode Semester I TA. 2025 adalah senilai Rp26.151.377.749,00 atau mencapai 49,35 persen dari alokasi anggaran senilai Rp52.988.789.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode Semester I TA. 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Periode 30 Juni 2025.

Nilai Aset periode 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp54.623.221.027,00 yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp155.056.207,00 Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp54.295.721.640,00, Properti Investasi (netto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp172.443.180,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji senilai Rp.1.563.052.432,00 yang terdiri hanya Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1.450.034.741,00; Utang yang belum ditagihkan Rp12.247.697,00; Uang Muka dari KPPN (UP dan TUP) senilai Rp100.770.000,00.

Nilai Ekuitas Dana disajikan senilai Rp53.060.168.589,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan / LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit / LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode 30 Juni 2025 adalah senilai Rp532.216.686,00 sedangkan jumlah beban adalah senilai Rp28.427.630.658,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(27.895.413.972,00); surplus dari kegiatan non operasional RP.29,00 dan entitas mengalami defisit – LO senilai Rp(27.895.413.943,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada awal Tahun 2025 adalah senilai Rp55.334.451.791,00 dikurangi defisit – LO senilai Rp(27.895.413.943,00). Koreksi yang menambah ekuitas Rp.0,00, Koreksi nilai aset non revaluasi Rp.(0,00); Transaksi antar entitas senilai Rp25.621.130.741,00 dengan kenaikan Ekuitas Rp(2.274.283.202,00) sehingga ekuitas entitas pada Periode 30 Juni 2025 adalah senilai Rp53.060.168.589,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 Juni 2025 dan 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025		% thd Angg	30 Juni 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	818.828.000	530.247.008	64,76	291.912.422
Jumlah Pendapatan		818.828.000	530.247.008	64,76	291.912.422
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	42.155.340.000	23.492.256.290	55,73	24.058.214.618
Belanja Barang	B.2.2	10.763.449.000	2.659.121.459	24,71	8.359.842.355
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasional		52.918.789.000	26.151.377.749	49,42	32.418.056.973
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Tanah	B.2.3.1	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3.2	70.000.000	-	0,00	596.852.550
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	B.2.3.3	-	-	0,00	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	B.2.3.4	-	-	#DIV/0!	149.714.000
Belanja Modal Lainnya	B.2.3.5	-	-		-
Jumlah Belanja Modal		70.000.000	-	0,00	746.566.550
JUMLAH BELANJA		52.988.789.000	26.151.377.749	49,35	33.164.623.523

II. NERACA

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 Juni 2025 dan 2024**

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	100.770.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	1.430.455.684	1.428.485.977
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.4	-1.428.485.977	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	1.969.707	-
Persediaan	C.6	52.316.500	128.621.500
Jumlah Aset Lancar		155.056.207	128.621.500
ASET TETAP			
Tanah	C.7	30.850.343.000	30.850.343.000
Peralatan dan Mesin	C.8	126.044.594.217	126.044.594.217
Gedung dan Bangunan	C.9	23.423.281.969	23.423.281.969
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	8.032.905.962	8.032.905.962
Aset Tetap Lainnya	C.11	155.769.275	155.769.275
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	0	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	-134.211.172.783	-
Jumlah Aset Tetap		54.295.721.640	55.070.863.246
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.14	189.498.000	189.498.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Properti Investasi	C.15	-17.054.820	-
Jumlah Aset Lainnya		172.443.180	174.338.160
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.14	237.928.680	237.928.680
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	-237.928.680	-
Jumlah Aset Lainnya		0	-
JUMLAH ASET		54.623.221.027	55.373.822.906
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	1.450.034.741	39.371.115
Utang Yang belum Ditagihkan	C.18	12.247.697	-
Uang Muka dari KPPN	C.19	100.770.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.563.052.438	39.371.115
JUMLAH KEWAJIBAN		1.563.052.438	39.371.115
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	53.060.168.589	55.334.451.791
JUMLAH EKUITAS		53.060.168.589	55.334.451.791
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		54.623.221.027	55.373.822.906

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	532.216.686	292.826.838
JUMLAH PENDAPATAN		532.216.686	292.826.838
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	24.942.291.031	25.608.770.585
Beban Persediaan	D.3	89.505.000	161.948.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.394.233.970	5.319.938.455
Beban Pemeliharaan	D.5	213.644.093	1.263.039.510
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.919.978	1.734.241.932
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	777.036.586	796.107.141
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN		28.427.630.658	34.884.046.123
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		27.895.413.972	34.591.219.285
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
<i>Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar :</i>		0	825.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset			
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	825.000
<i>Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :</i>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	29	408
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		29	825.408
POS LUAR BIASA	D.11	27.895.413.943	34.590.393.877
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS / DEFISIT LO	D.12	27.895.413.943	-34.590.393.877

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2025
EKUITAS AWAL		55.334.451.791	55.510.254.295
SURFLUS/ DEFISIT LO	E.1		
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.2	- 27.895.413.943	- 34.590.393.877
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN		0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		0	0
LAIN - LAIN		0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	0	0
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	0	0
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
Jumlah Lain-Lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	25.621.130.741	32.872.711.101
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		0	0
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		0	0
TRANSFER KELUAR		0	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-2.274.283.202	-1.717.682.776
EKUITAS AKHIR	E.9	53.060.168.589	53.792.571.519

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor **PER-42/PB/2015** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **222/PMK.05/2016** tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **225/PMK.05/2016** tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **104/PMK.05/2017** tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-21/PB/PB.6/2023 Tanggal 05 Juli 2023 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.
11. Surat Kepala BPPSDMKP Nomor : B.4542/BRSDM.1/KU.520/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2024 Perihal Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dibawah oleh Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon kini dikenal juga sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) bagi Penyuluh Perikanan PNS yang berada di wilayah kerjanya. Hal ini termaktub dalam Surat Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor : 68/KEP-BRSDM/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis yang menangani Penyuluhan di Lingkup Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Selama Periode Semester I - Tahun Anggaran 2025 ini, BPPP Ambon dipercayakan untuk bertanggungjawab menangani 70 Penyuluh Perikanan Bantu sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 8 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2025. Sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka BPPP Ambon sepenuhnya menangani administrasi Penyuluh Perikanan yang tersebar di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

A.2.1.1 VISI

Visi adalah cara pandang jarak jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**.

A.2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman.

Misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun dari 9 misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung 4 misi yaitu :

1. Misi I → Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi II → Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi sector Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi IV → Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi VIII → Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

A.2.1.3 Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan dan sasaran BPPP Ambon adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan yang memenuhi standar kualifikasi SDM Regional, Nasional dan Internasional
2. Meningkatkan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Meningkatkan interkoneksi antar stakeholder dan antar berbagai instansi terkait wilayah kerja BPPP Ambon
4. Meningkatkan kerjasama dan kualitas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pelatihan dan penyuluhan BPPP Ambon.

A.2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun fungsi Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah :

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan

anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;

- 2) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 4) Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- 5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia.

Susunan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri.

- **Subbagian Umum** dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kedisiplinan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan, serta pelaporan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan.
- **Kelompok Jabatan Fungsional** (dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada awal Tahun 2025 didukung oleh 45 Orang Pegawai di Balai; 26 PPNPN; 234 Pegawai Penyuluh Perikanan; 17 PPPK Penyuluh dan 70 Penyuluh Perikanan Bantu.

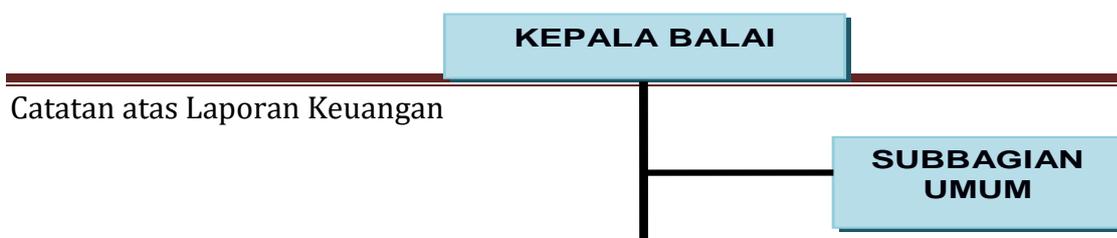
Data Pegawai tersaji dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Data Pegawai BPPP Ambon

Data	Σ Pegawai Aktif Awal Tahun 2022	Data s.d. 30 Juni 2022			Σ Pegawai Aktif s.d. 30 Juni 2024	Keterangan
		Pensiun	Meninggal	Tidak aktif/ Pindah		
PNS Balai	45	-	-	-	45	Sampai dengan 30 Juni 2025 adalah 45
PPNPN Balai	26	-	-	-	26	Masih Aktif (24 tenaga teknis, 1 Dokter, 1 Perawat)
Penyuluh	241	4	1	2	234	Awal Tahun Penyuluh 241 Orang pensiun 4 penyuluh, pindah 1 orang dan tidak aktif 1 orang dan meninggal 1 orang
PPPK Penyuluh	17	-	-	-	17	Masih Aktif seluruhnya
Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	85	-	-	15	70	Sampai Juni 2025 ada 15 PPB yang di non aktifkan tertanggal 1 April 2025
Total	414	4	1	17	492	

Berdasarkan tabel 5 diatas, Data Pegawai Aktif BPPP Ambon terdiri atas : Jabatan Pejabat Struktural dan Pelaksana sebanyak 26 Orang Pegawai dan Jabatan Fungsional sebanyak 297 Orang Pegawai, yaitu : 3 Widyaiswara, 13 Instruktur, 234 Penyuluh Perikanan, dan 17 PPPK Penyuluh; serta dibantu oleh 26 Orang PPNPN (24 Orang Tenaga Teknis, 1 Orang Dokter, 1 Orang Perawat) dan 70 Penyuluh Perikanan Bantu.

Berikut ini tersaji *Struktur Organisasi Balai*.



Dukungan sumberdaya manusia (SDM) pada kegiatan-kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, dapat dilihat sebagai berikut :

➤ **Menurut Golongan**

Untuk 45 Pegawai Balai, terdiri atas :

Golongan IV/c 1 orang; Golongan IV/b sebanyak 1 Orang; Golongan IV/a sebanyak 5 Orang; Golongan III/d sebanyak 7 Orang; Golongan III/c sebanyak 5 Orang; Golongan III/b sebanyak 14 Orang; Golongan III/a sebanyak 8 Orang; Golongan II/d sebanyak 2 Orang; Golongan II/c sebanyak 2 Orang .

Untuk 234 Penyuluh Perikanan, terdiri atas :

Golongan IV/c sebanyak 1 Orang; Golongan IV/b sebanyak 5 Orang; Golongan IV/a sebanyak 15 Orang; Golongan III/d sebanyak 48 Orang; Golongan III/c sebanyak 18 Orang; Golongan III/b sebanyak 33 Orang; Golongan III/a sebanyak 37 Orang; Golongan II/d sebanyak 23 Orang; Golongan II/c sebanyak 28 Orang; Golongan II/b sebanyak 15 Orang dan Golongan II/a sebanyak 11 Orang.

➤ **Menurut Jenjang Jabatan**

Jenjang Jabatan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

- Eselon III sebanyak 1 Orang
- Eselon IV sebanyak 1 Orang
- Jabatan Fungsional Tertentu 295 Orang, terdiri atas :
 - a. Instruktur sebanyak 14 Orang
 - b. Widyaiswara sebanyak 2 Orang
 - c. Penyuluh Perikanan sebanyak 251 Orang
 - d. Fungsional Lainnya sebanyak 2
- Jabatan Fungsional Umum sebanyak 26 Orang

➤ **Menurut Jenjang Pendidikan**

Untuk 45 Pegawai Balai, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 15 Orang; S1 sebanyak 11 Orang; D-IV sebanyak 2 Orang; D-III sebanyak 4 Orang; dan SLTA sebanyak 12 Orang.

Untuk 234 Penyuluh Perikanan, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 3 Orang; S1 sebanyak 129 Orang; D-IV sebanyak 21 Orang; D-III sebanyak 54 Orang dan SLTA/SUPM sebanyak 73 Orang..

BPPP Ambon didirikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, BPPP Ambon berkomitmen dengan visi

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang berkualitas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Periode Semester I - Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3.1 Basis Akuntansi

Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (238755) menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis

akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3.2 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Semester I - Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan - aturan, dan praktik - praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan - kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-LO*

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan - LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan - LO di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan - LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan di akui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan sewa gedung di akui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda di akui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Beban*

Kebijakan
Akuntansi atas
Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan/lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

-

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian Laporan Keuangan. Pertama, Pos - pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun - akun Tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian Akuntansi Berbasis Akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

A.4. PENGUNGKAPAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA LAPORAN KEUANGAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Wabah ini memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah.

Merespon hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengambil strategi dan kebijakan sebagai langkah antisipasi dan upaya mengurangi dampak pandemi yaitu menginstruksikan kepada semua UPT Lingkup BRSDM KP termasuk **Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon** untuk melakukan kegiatan sterilisasi secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada berbagai sarana dan parasarana di lingkungan balai, menghimbau adanya gerakan sadar cuci tangan bagi seluruh pegawai, *physical distancing* dan penggunaan wajib masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan virus pada orang lain. Selain itu, pengalokasian anggaran beberapa kegiatan juga dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap Kebijakan Akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan BPPP Ambon. Pengungkapan terhadap transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan COVID-19 wajib diungkap dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-032.12.2.238755/2025 Tanggal 02 Desember 2024, selama Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah mengadakan enam (6) kali Revisi DIPA dari DIPA Awal.

Berikut disajikan Data Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran Revisi 1 dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Data Pagu Anggaran BPPP Ambon Semester I Tahun 2025

Uraian	Semester I Tahun Anggaran 2025	
	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi ke-6
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	Rp 818.828.000	Rp 818.828.000
Pendapatan Lain-Lain	Rp -	Rp -
Jumlah Pedapatan	Rp 818.828.000	Rp 818.828.000
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 42.155.340.000	Rp 42.155.340.000
Belanja Barang	Rp 11.423.525.000	Rp 10.763.449.000
Belanja Bansos	Rp -	Rp -
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
Pendapatan Lain - Lain		
Jumlah Belanja	Rp 53.648.865.000	Rp 52.988.789.000

Adapun alasan dilakukannya Revisi DIPA Satker adalah sebagai berikut :

- Revisi I disetujui pada 12 Februari 2025 yaitu Revisi DIPA berupa Kategori Revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Revisi Halaman III DIPA.
- Revisi II disetujui pada 21 Ferbruari 2025 berupa revisi dja berupa blokir anggaran
- Revisi III disetujui pada 20 Maret 2025 yaitu revisi dja berupa pergeseran blokir pemenuhan honor ppb
- Revisi IV disetujui pada 09 April 2025 yaitu revisi dja berupa pergeseran blokir operasional KP

- Revisi V disetujui pada 23 April 2025 yaitu Revisi kanwil hal 3 dipa dan Revisi Halaman III DIPA.
- Revisi VI disetujui pada 28 Mei 2025 merupakan Kategori Revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Jenis Revisi pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu program, satu Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan dimaksud.

Secara rinci *Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025* dapat disajikan sebagai berikut :

*Tabel 9
Rincian Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 818.828.000	Rp 530.247.008	64,76
Jumlah Pendapatan	Rp 818.828.000	Rp 530.247.008	64,76
Belanja			
Belanja Pegawai	Rp 42.155.340.000	Rp 23.492.256.290	55,73
Belanja Barang	Rp 10.763.449.000	Rp 2.659.121.459	24,71
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 52.988.789.000	Rp 26.151.377.749	49,35

Dalam Tahun Anggaran 2025 ini, BPPP Ambon tidak adaakun belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

B.1 Pendapatan Negara

*Realisasi
Pendapatan Negara
Rp530.247.008,00*

Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp530.247.008,00 atau mencapai 64,76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp818.828.000,00.

Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPP Ambon menggunakan jenis dan tarif yang tertuang dalam *Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2021* yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pendapatan Negara dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon terdiri dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan (425112), Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan (425131), Pendapatan sewa peralatan dan mesin (425132), Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi (425151), Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan (425421), Pendapatan denda lainnya (425839), Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) dan Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini:

*Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	Semester I Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan penjualan hasil perikanan	Rp 57.100.000	Rp -	-
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 95.334.000	Rp 5.736.000	6,02
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	Rp -	Rp 395.775.744	#DIV/0!
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	Rp 75.994.000	Rp 120.819.720	158,99
Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan	Rp 590.400.000	Rp -	-
Pendapatan denda lainnya	Rp -	Rp 7.915.515	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		Rp 29	#DIV/0!
Jumlah I	Rp 818.828.000	Rp 530.247.008	64,76

Adapun realisasi Pendapatan di Semester I ini diperoleh dari Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan berupa Penerimaan Sewa Rumah Dinas Pegawai dan Penerimaan dari Penggunaan Sewa Gedung Bangunan oleh Pihak ketiga); Pendapatan sewa peralatan dan mesin berupaya sewa kapal Bawal Putih 3; Pendapatan penggunaan Sarpras sesuai tusi; serta Penerimaan kembali Belanja Pegawai di TAYL.

Maka perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI s.d. 30 Juni 2025	REALISASI s.d. 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Gedung Bangunan	Rp 5.736.000	Rp 12.907.014	-55,56
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	Rp 395.775.744	Rp -	#DIV/0!
Pendapatan Pengg. Sarpras Tusi	Rp 120.819.720	Rp 37.380.000	223,22
Pendapatan Denda Lainnya	Rp 7.915.515	0	#DIV/0!
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	Rp -	Rp 825.000	-100,00
Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan	Rp -	Rp 240.800.000	-100,00
Penerimaan kembali bel.peg. TAYL	Rp 29	Rp 408	-92,89
Penerimaan kembali bel. barang TAYL	Rp -	Rp -	0,00
Pendapatan penjualan hasil perikanan	Rp -	Rp -	0,00
TOTAL I + II	Rp 530.247.008	Rp 291.912.422	81,65

Berdasarkan Tabel 11, tersaji perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2025 dan 2024 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 16,89 *persen* dibandingkan realisasi pendapatan pada Semester I Tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena :

1. Karena rendahnya sewa peralatan mesin berupa sewa kapal Bawal Putih 3 oleh pihak ketiga);
2. adanya denda lainnya berupa keterlambatan pembayaran.
3. Tingginya Penerimaan pada Pos pendapatan sarpras sesuai tusi.

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp33.164.623.523,00

Realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp33.164.623.523,00 atau 49,13 persen dari pagu anggaran senilai Rp67.500.343.000,00.

Adapun rincian Anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2023 tersaji pada Tabel 12 berikut ini.

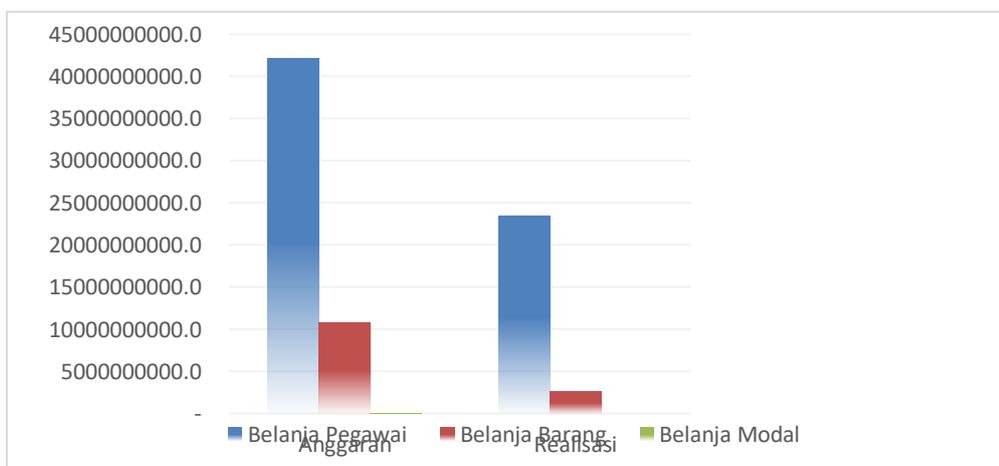
Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 42.155.340.000	Rp 23.492.256.290	55,73
Belanja Barang	Rp 10.763.449.000	Rp 2.659.121.459	24,71
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp -	0
Total Belanja Kotor	Rp 52.988.789.000	Rp 26.151.377.749	49,35
Pengembalian Belanja		Rp -	
Belanja Netto	Rp 52.988.789.000	Rp 26.151.377.749	49,35

Berdasarkan Tabel 12, Persentase Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025 adalah 49,35 persen, merupakan *Persentase Realisasi yang masuk dalam kategori Baik*, walaupun diharapkan dapat memenuhi ± 50 persen.

Adapun hal yang menyebabkan tidak tercapainya target 50 persen di semester ini adalah karena : ada beberapa Kegiatan yang tidak yang terkena blokir akibat efisiensi (khusus kegiatan pelatihan Ambon dan kegiatan BST serta sebagian operasional).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan grafik diatas, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp42.155.340.000,00 terealisasi Rp23.492.256.290,00 atau 55,73 persen. Belanja Barang dianggarkan senilai Rp10.763.449.000,00 terealisasi Rp2.659.121.459,00 atau 24,71 persen, sedangkan Belanja Modal dianggarkan Rp70.000.000,00 terealisasi Rp0,00 atau 00,00 persen.

Berikut disajikan pula Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

*Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	Semester I 2025	Semester I 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 23.492.256.290	Rp 24.058.214.618	(2,35)
Belanja Barang	Rp 2.659.121.459	Rp 8.359.842.355	(68,19)
Belanja Modal	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)
Jumlah Belanja	Rp 26.151.377.749	Rp 33.164.623.523	(21,15)

Berdasarkan Tabel 13, Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) untuk Semester I Tahun 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja mengalami *penurunan* sebesar 21,15 persen dibandingkan realisasi belanja Semester I Tahun 2024.

Penurunan Realisasi Anggaran Belanja tersebut disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Pegawai mengalami *penurunan* 2,35 persen, karena adanya adanya pemindahan PPPK Tahun ini.
2. Realisasi Belanja barang di Tahun 2025 lebih kecil dari realisas belanja barang di Tahun 2024 lalu.

B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp23.492.256.290,00*

Realisasi Belanja Pegawai *Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon* meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp23.492.256.290,00 dan Rp24.058.214.618,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 8.080.826.000	Rp 8.238.899.780	(1,92)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 118.455	Rp 134.842	(12,15)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 545.095.910	Rp 551.404.370	(1,14)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 172.850.598	Rp 174.351.194	(0,86)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 10.080.000	Rp 10.080.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.358.996.000	Rp 1.382.146.000	(1,67)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 120.515.632	Rp 121.979.646	(1,20)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 440.386.020	Rp 448.424.640	(1,79)
Beban Uang Makan PNS	Rp 895.263.000	Rp 904.636.000	(1,04)
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 31.745.000	Rp 33.165.000	(4,28)
Beban Tunj. Daerah Terpencil PNS	Rp 34.125.000	Rp 35.100.000	(2,78)
Beban Tunj. Khusus Papua PNS	Rp 281.625.000	Rp 288.350.000	(2,33)
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 435.689.600	Rp 777.741.600	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 9.030	Rp 16.933	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 21.784.480	Rp 47.226.480	-
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 4.869.472	Rp 11.838.656	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	Rp 73.440.000	Rp 123.840.000	-
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 20.277.600	Rp 42.293.280	-
Beban Uang Makan PPPK	Rp 56.388.000	Rp 86.615.000	-
Beban Tunjangan Khusus (Tukin)	Rp 10.357.626.282	Rp 9.950.899.131	4,09
Beban Tunjangan Khusus (Tukin) PPPK	Rp 550.730.211	Rp 829.074.530	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp 23.492.441.290	Rp 24.058.217.082	(2,35)
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (185.000)	Rp (2.464)	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp 23.492.256.290	Rp 24.058.214.618	(2,35)

Berdasarkan Tabel 14, Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2025 mengalami *penurunan* sebesar 2,35 persen dari realisasi belanja pegawai di Semester I Tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan PPPK di Tahun lalu dan adanya pegawai yang pensiun.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp2.659.121.459,00

Realisasi Belanja Barang Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon di Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp2.659.121.459,00 dan Rp8.359.842.355,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Barang Semester I Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

*Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Periode Semester I - TA. 2025*

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 183.300.506	Rp 241.711.755	Rp (58.411.249)
Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	Rp -	Rp 318.500	Rp (318.500)
Bel.Honor Operasional Satker	Rp 49.950.000	Rp 43.760.000	Rp 6.190.000
Bel.Barang Operasional Lainnya	Rp 171.603.338	Rp 615.243.978	Rp (443.640.640)
Bel.Barang Operasional - COVID19	Rp -	Rp -	-
Belanja Bahan	Rp 29.601.900	Rp 1.319.087.600	Rp (1.289.485.700)
Honor Terkait Output Kegiatan	Rp 1.055.800.000	Rp 1.364.600.000	Rp (308.800.000)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 23.403.144	Rp 788.867.522	Rp (765.464.378)
Belanja Barang Non Operasional - COVID19	Rp -	Rp -	-
Belanja peralatan dan mesin ekstrakomtabel	Rp -	-	-
Belanja Barang Persediaan brg konsumsi	Rp 13.200.000	Rp 163.769.500	Rp (150.569.500)
Belanja Langganan Listrik	Rp 200.026.700	Rp 268.006.201	Rp (67.979.501)
Belanja Langganan Telepon	Rp -	-	-
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 127.764.000	Rp 68.382.000	Rp 59.382.000
Belanja Sewa	Rp -	Rp 120.740.000	Rp (120.740.000)
Bel. Jasa Profesi	Rp 32.340.000	Rp 107.120.000	Rp (74.780.000)
Bel. Jasa Lainnya	Rp 547.567.800	Rp 358.951.851	Rp 188.615.949
Bel. Jasa - COVID 19	Rp -	-	-
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 71.478.000	Rp 590.924.000	Rp (519.446.000)
Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 83.615.593	Rp 565.619.415	Rp (482.003.822)
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan	Rp 58.550.500	Rp 88.004.600	Rp (29.454.100)
Bel. Perjalanan Biasa	Rp 10.919.978	Rp 730.876.733	Rp (719.956.755)
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	Rp -	-	-
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota	Rp -	Rp 923.858.700	Rp (923.858.700)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 2.659.121.459	Rp 8.359.842.355	Rp (5.700.720.896)
Pengembalian Belanja	Rp -	-	-
Jumlah Belanja Neto	Rp 2.659.121.459	Rp 8.359.842.355	Rp (5.700.720.896)

Berdasarkan Tabel 15, Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2025 mengalami *penurunan* senilai Rp5.700.720.896,00 dari Realisasi Belanja Barang di Semester I Tahun 2024.hal ini dikarenakan pagu dan Realisasi Belanja barang di Tahun 2025 lebih kecil dari realisas belanja barang di Tahun 2024 lalu.

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Tidak ada Realisasi penggunaan Akun Penanganan COVID-19 di Semester I Tahun 2025 karena di Tahun 2025 sudah tidak ada akun COVID-19

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 16

Rincian Belanja Barang dengan Akun Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
	Total	0	0	0

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Periode Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp746.566.550,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dibuat dengan tepat dan memberikan manfaat pada periode tertentu.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam Semester I Tahun 2025 memiliki Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) .

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2025 dan 2024 dalam tabel berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Semest. I Tahun 2025	Realisasi Semest. I Tahun 2024	Naik (Turun) %
Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 596.852.550	(100,00)
Bel. Modal Penambahan nilai Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi diatas, terlihat realisasi belanja modal mengalami *Penurunan 100% persen* bila dibandingkan dengan realisasi di Semester I Tahun 2024, namun Paket-Paket Pekerjaan Belanja Modal untuk Tahun 2025 ini belum ada realisasi karena terkena blokir akibat dari efisiensi.

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi pada periode ini.

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode Semester I TA. 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp596.852.550,00.

Berikut disajikan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Semester I 2025	Semester I 2024	%
Peralatan pelayanan publik	Rp -	Rp 196.865.160	0,00
Paket Pekerjaan pengadaan barang Sarana Pendingin Rungan dan Perkantoran	Rp -	Rp 199.988.700	0,00
Sarana budidaya	Rp -	Rp 199.998.690	
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 596.852.550	#DIV/0!
Pengembalian	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 596.852.550	#DIV/0!

Berdasarkan Tabel 18, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2025 ini mengalami *penurunan`100% persen* bila dibandingkan dengan di Semester I Tahun 2024. ini diakibatkan ada pemblokiran anggaran akibat efisiensi.

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai 0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Semester I Tahun 2025 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Semester I TA.2025	Semester I TA.2024	Naik/ Turun (%)
	Rp -	Rp -	-
	Rp -	Rp -	-
	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 19, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di periode ini tidak ada realisasi dibandingkan dengan semester I Tahun 2025 dikarenakan tahun 2024 tidak ada belanja modal gedung dan bangunan.

B.2.3.4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Periode Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tahun 2024 tidak ada realisasi Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung dan Bangunan.

Berikut disajikan Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 dan 2024 dalam tabel 20 sebagai berikut :

*Tabel 20
 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan
 Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Semester I TA 2025	Realisasi Semester I TA 2024	Naik/Turun (%)
	Rp -	Rp -	-
	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Sesuai Tabel diatas, Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Semester I Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan 2024 dikarenakan tidak di anggarkan.

B.2.3.5. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai senilai Rp0,00 dan Rp149.714.000,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Semester I TA 2025	Realisasi Semester I TA 2024	Naik/ Turun (%)
Renovasi Pelayanan Publik			0,00
Renovasi Gedung Kantor	0	149.714.000	0,00
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)

Sesuai Tabel diatas, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025 ini mengalami *penurunan* sebesar 100 persen dari realisasi Semester I Tahun 2024 hal ini dikarenakan tidak di anggarkan.

B.2.3.6. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

B.2.3.7. Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan di Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Semester I TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Semester I TA 2025	Realisasi Semester I TA 2024	Naik/Turun (%)
	Rp -	Rp -	
	Rp -	Rp -	
	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 22, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan pada periode ini tidak mengalami realisasi.

B.2.3.8. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan di Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

*Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Penambahan Nilai Jaringan Semester I TA.2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Semester I TA 2025	Realisasi Semester I TA 2024	Naik/Turun (%)
	Rp -	Rp -	
	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 23, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada periode ini tidak mengalami realisasi.

B.2.3.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan di Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai 0,00 atau tidak mengalami realisasi.

B.2.4. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tidak memiliki Pagu Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2025.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
 Pengeluaran
 Rp100.770.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp100.70.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan maupun Tambahan Uang Persediaan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 24 sebagai berikut.

Tabel 24
 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Rincian Saldo
1	BTN Cabang Ambon	-
2	Saldo UP	100.770.000
3	Saldo TUP	-
4	Kuitansi UP/TUP	-
	Jumlah	100.770.000
5	BP Pajak	-
6	LS Bendahara	-
7	Selisih Kas	-
	Total UP/TUP	100.770.000
	Saldo Kas	100.770.000

Berdasarkan Tabel 24 diatas, dapat dijelaskan bahwa : saldo sampai dengan akhir Periode 30 Juni 2025 adalah Rp100.770.000,00.

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
 Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas lain yang berada dalam penguasaan bendahara selain uang persediaan. Saldo kas lainnya dan setara kas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 25.

*Tabel 25
Rincian Kas Lainnya dan Setara kas*

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Belanja Brg yg msh hrs dbayar	-	-
Utang Pajak yang blm disetor	-	-
	-	-

Sesuai Tabel 25 diatas, Saldo kas Lainnya dan Setara Kas Periode 30 Juni 2025 adalah senilai Rp0,00 yaitu :

C.3. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp1.430.455.684,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.430.455.684,00 dan Rp1.428.485.977,00 .

Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji dalam Tabel 26.

*Tabel 26
Rincian Piutang Bukan Pajak*

No	Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Piutang Bukan Pajak	1.430.455.684	1.428.485.977
2	Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang bukan pajak	(1.428.485.977)	(1.428.485.977)
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.969.707	-

Sesuai Tabel 26 diatas, Nilai Piutang Bukan Pajak adalah senilai Rp1.969.7070,00 merupakan nilai potongan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2025 atas Sewa Rumah Dinas Pegawai yang telah diajukan di periode Juni 2025 dan senilai Rp.1.428.485.977,00 merupakan koreksi dari BPK Tahun 2023 atas pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan

atas PT. Carita Boat Indonesia.

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang Tdk
Tertagih – Piutang Bukan
Pajak
Rp(1.428.485.977,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(1.428.485.977,00).

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji dalam Tabel berikut.

*Tabel 27
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang per 30 Juni 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2024
Lancar		-
Kurang Lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	(1.428.485.977)	(1.428.485.977)
TOTAL	(1.428.485.977)	(1.428.485.977)

Sesuai Tabel 27 diatas, Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 adalah Rp(1.428.485.977,00) merupakan koreksi BPK Tahun 2023 Pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia

C.5. Persediaan

*Persediaan
Rp52.316.500,00*

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp52.316.500,00 dan Rp128.621.500,00.

Rincian Persediaan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 28.

*Tabel 28
Rincian Persediaan*

No	Persediaan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2.872.500	36.262.000
2	Persediaan Lainnya	49.444.000	92.359.500
Jumlah		52.316.500	128.621.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6. Tanah

Tanah
Rp30.850.343.000,00

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp30.850.343.000,00 atau tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

Rincian saldo tanah disajikan pada Tabel 29 berikut.

*Tabel 29
Rincian Saldo Tanah milik BPPP Ambon*

No	KIB	Luas	Nilai	lokasi
1	1	23.920 M2	30,354,480,000	Jl. Martha Alfons Poka
2	2	256 M2	187,296,000	Jl. Martha Alfons Poka
3	3	850 M2	308,567,000	Jl. Wolter Monginsidi Lateri
Jumlah			30,850,343,000	-

C.7. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp126.044.594.217,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp126.044.594.217,00 dan Rp126.044.594.217,00 tidak mengalami mutasi tambah atau kurang pada periode ini.

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 30
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	126.044.594.217
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	-
Ketidaksesuaian Kode Akun belanja barang menjadi aset	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Perolehan Lainnya (belanja peralatan dan mesin)	Rp	-
Mutasi Kurang :		
Pembelian - Ekstakomtabel (koreksi pencatatan)	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	126.044.594.217
Akumulasi Penyusutan	Rp	(124.061.016.974)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	1.983.577.243

Berdasarkan Tabel 30 diatas, Saldo Peralatan dan Mesin tidak mengalami mutasi tambah atau kurang.

C.8. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp23.423.281.969,00

Nilai Gedung dan Bangunan periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.423.281.969,00 dan Rp23.423.281.969,00 tidak mengalami mutasi tambah atau kurang pada periode ini.

Rincian transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan pada Tabel 31 sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2024	23.423.281.969
Mutasi Tambah:	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan gedung kantor	-
Pengawasan renovasi pelayanan publik	-
Mutasi Kurang :	
Ketidaksesuaian Kode Akun	-
Saldo per 30 Juni 2025	23.423.281.969
Akumulasi Penyusutan	(4.222.631.505)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	19.200.650.464

C.9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
 Jaringan
 Rp8.032.905.962,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 8.032.905.962,00 dan Rp. 8.032.905.962,00. Atau tidak mengalami mutasi pada periode ini.

Berikut disajikan dalam Tabel 32 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Tabel 32
 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2024	8.032.905.962
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	8.032.905.962
Akumulasi Penyusutan	(5.151.432.698)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	2.881.473.264

Sesuai Tabel 32 diatas, Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami mutasi tambah ataupun kurang pada periode ini.

C.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
 Rp155.769.275,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp155.769.275,00.

Berikut disajikan Mutasi kurang transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dalam Tabel 33 sebagai berikut:

Tabel 33
 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	155.769.275
Mutasi tambah:		
Normalisasi BMN	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	155.769.275
Akumulasi Penyusutan	Rp	(950.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	154.819.275

Sesuai tabel 33 diatas, Saldo Aset Tetap Lainnya pada periode ini tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam
 Pengerjaan
 Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 34
 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	31 Des 2024
KDP	0	0
KDP	0	0

Pada periode ini, tidak ada saldo Konstruksi dalam Pengerjaan.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
 Aset Tetap
 Rp(134.211.172.783,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp(1334.211.172.783,00) dan Rp(133.436.031.177,00) atau tidak mengalami mutasi tambahdan kurang dari periode sebelumnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35
 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 126.044.594.217	Rp 124.486.383.967	Rp 1.558.210.250
2	Gedung dan Bangunan	Rp 23.423.281.969	Rp 4.517.786.359	Rp 18.905.495.610
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 8.032.905.962	Rp 5.206.052.457	Rp 2.826.853.505
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 155.769.275	Rp 950.000	Rp 154.819.275
	Akumulasi Penyusutan	Rp 157.656.551.423	Rp 134.211.172.783	Rp 23.445.378.640

C.13. Properti Invesatsi

Properti Investasi
Rp189.498.00,00

Saldo Properti Investasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp189.498.000,00 atau tidak mengalami penghentian penggunaan aset pada periode ini.

Adapun mutasi Properti Invesatsi disajikan dalam sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian properti investasi

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi Tambah:		
Properti Investasi Bangunan Kantin	Rp	189.498.000
Mutasi kurang:		
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	189.498.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(17.054.820)
Nilai Buku per 30 JUni 2025	Rp	172.443.180

C.14. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akum.Penyusutan
Properti investasi
Rp(17.054.820,00)

Akumulasi Penyusutan Lainnya merupakan kontra Akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(17.054.820,00) dan Rp(15.159.840,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi properti investasi

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Properti Investasi	Rp.189.498.000	Rp17.054.820	Rp172.443.180
	Jumlah	Rp.189.498.000	Rp17.054.820	Rp172.443.180

C.15. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp237.928.680,00

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perkantoran.

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

adalah senilai Rp237.928.680,00 atau tidak mengalami penghentian penggunaan aset pada periode ini.

Adapun mutasi aset lain-lain disajikan dalam sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	237.928.680
Mutasi Tambah:		
Mutasi kurang:		
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	237.928.680
Akumulasi Penyusutan	Rp	(237.928.680)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	-

C.16. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akum. Peny&Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(237.928.680,00)

Akumulasi Penyusutan Lainnya merupakan kontra Akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(237.928.680,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Rp.237.928.680	Rp.237.928.680	0
Jumlah		Rp.237.928.680	Rp.237.928.680	0

C.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
ketiga
Rp1.450.034.741,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.1.450.034.741,00 dan

Rp39.371.115,00.

Rincian Utang kepada Pihak ketiga pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	39.371.115
Pelunasan Beban Listrik dan Telp Des 2024	Rp	(39.371.115)
Saldo Per Januari 2025	Rp	-
Utang kepada Pihak ketiga	Rp	1.450.034.741
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	1.450.034.741

Saldo Utang Pihak ketiga senilai Rp1.450.034.741,00 terdiri atas :

- SPM/SP2D Gaji Bulan Juli 2025 sebesar Rp.1.1.450.034.741,-

C.18. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum
Ditagihkan
Rp.12.247.697,00

Utang yang belum Ditagihkan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp12.247.697,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang yang belum Ditagihkan pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Rincian Utang yang belum Ditagihkan

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Utang yang belum Ditagihkan	Rp	12.247.697
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	12.247.697

Saldo Utang yang belum ditagihkan terdiri dari:

1. Ada tagihan kontrak berupa honor tenaga Outsourcing bulan Juni 2025 yang akan di SPM-kan bulan Juli 2025 sebesar Rp.12.247.697,-

C.19. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp100.770.000,00

Uang Muka dari KPPN diberikan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Satker untuk dikelola sebagai Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.

Uang Muka dari KPPN sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp100.770.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Uang Muka dari KPPN pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 42
Rincian Uang Muka dari KPPN

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Uang Muka dari KPPN	Rp	100.770.000
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	100.770.000

Saldo Uang Muka dari KPPN senilai Rp100.770.000,00 merupakan Saldo Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) senilai Rp100.770.000,00 dan Saldo Tambahan Uang Persediaan senilai Rp511.527.000,00.

C.20. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek
lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari atau 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 41
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	-

C.21. EKUITAS

Ekuitas
Rp53.060.168.589,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp53.060.168.589,00 dan Rp55.334.451.791,00 .

Saldo Ekuitas ini harus memiliki nilai yang sama pada Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp532.216.686,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah senilai Rp532.216.686,00 dan Rp292.826.838,00.

Pendapatan tersebut disajikan dalam tabel 42 berikut :

Tabel 42
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak s.d. per.30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa tanah,Gedungdan bangunan	Rp 5.736.000	Rp 14.646.838	(60,84)
Pendapatan Pengg. Sarpras sesuai tusi	Rp 122.789.427	Rp 37.380.000	228,49
Pendapatan Layn. Pend./Pelat.	Rp -	Rp 240.800.000	(100,00)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya			-
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	Rp 395.775.744	Rp -	-
Pendapatan Denda lainnya	Rp 7.915.515		-
Jumlah	Rp 532.216.686	Rp 292.826.838	81,75

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak milik BPPP Ambon periode ini senilai Rp292.851.838,00 atau mengalami *Kenaikan* senilai 55,02 *persen* dari periode Semester I Tahun 2025 berupa :

- ❖ Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan yang merupakan pendapatan-LO senilai Rp532.216.686,00 yang diperoleh dari :
 - Penerimaan atas sewa rumah dinas pegawai (potongan SPM Gaji) senilai Rp5.736.000,00
 - Penggunaan sewa gedung/bangunan oleh pihak luar balai senilai Rp122.789.427,00.
- ❖ Pendapatan Sewa peralatan mesin berupa sewa kapal bawal Putih 3 senilai Rp395.775.744.000,00.
- ❖ Pendapatan denda lainnya berupa keterlambatan pembayaransewa kapal senilai Rp7.915.515,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah terdapat realisasi senilai Rp530.247.008,00 sedangkan pada Laporan Operasional (LO) terdapat realisasi pendapatan senilai Rp532.216.686,00.

Perbedaan nilai pendapatan tersebut disebabkan karena Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah mencatat semua bentuk Pendapatan Penerimaan kecuali Piutang Lainnya yang pencatatan penerimaannya akan terjadi di Periode selanjutnya, sedangkan pada Laporan Operasional mencatat pendapatan atas Sewa Rumah Dinas Bulan Juli Rp1.969.678,00 namun mencatat Piutang Lainnya yang telah terjadi pada periode tersebut.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp24.942.291.031,00

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp24.942.291.031,00 dan Rp25.608.770.585,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 43
Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 9.090.626.960	Rp 9.259.812.980	(1,83)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 132.855	Rp 146.888	(9,55)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 612.740.500	Rp 619.522.450	(1,09)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 194.228.532	Rp 196.124.102	(0,97)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 11.340.000	Rp 11.340.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.526.629.000	Rp 1.554.827.000	(1,81)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 122.131.290	Rp 123.469.792	(1,08)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 494.990.700	Rp 504.188.040	(1,82)
Beban Uang Makan PNS	Rp 895.263.000	Rp 904.636.000	(1,04)
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 35.795.000	Rp 36.855.000	(2,88)
Beban Tunj. Daerah Terpencil PNS	Rp 39.725.000	Rp 40.950.000	(2,99)
Beban Tunj. Khusus Papua PNS	Rp 328.100.000	Rp 336.425.000	(2,47)
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 490.150.800	Rp 894.550.800	(45,21)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 10.269	Rp 19.616	(47,65)
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 24.667.720	Rp 54.456.840	(54,70)
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 5.510.192	Rp 13.726.336	(60)
Beban Tunj. Fungsional PPPK	Rp 82.620.000	Rp 142.320.000	(41,95)
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 22.884.720	Rp 48.811.080	(53,12)
Beban Uang Makan PPPK	Rp 56.388.000	Rp 86.615.000	(34,90)
Beban Tunjangan Khusus (Tukin)	Rp 10.357.626.282	Rp 9.950.899.131	4,09
Beban Tunjangan Khusus (Tukin) PPPK	Rp 550.730.211	Rp 829.074.530	(33,57)
Jumlah Beban Kotor	Rp 24.942.291.031	Rp 25.608.770.585	(2,60)
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	-
Jumlah Beban Bersih	Rp 24.942.291.031	Rp 25.608.770.585	(2,60)

Berdasarkan Tabel 43 diatas, Laporan Operasional – Beban Pegawai Periode 30 Juni 2025 mengalami *Kenaikan 2,60 persen* atas beban pegawai di Periode 30 Juni 2024.

Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp23.492.256.290,00 dan Laporan Operasional (LO) – Beban Pegawai Rp24.942.291.031,00 memiliki nilai yang sama (selisih) senilai Rp1.450.034.741,00.

Selisih tersebut merupakan selisih pencatatan dimana Laporan Operasional (LO) – Beban Pegawai mencatat semua bentuk beban pegawai yang terjadi di Periode Juni 2024 (termasuk Gaji Induk Juli 2025) yang pencairan anggarannya terjadi di Periode Juli 2025.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp89.505.000,00

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp89.505.000,00 dan Rp161.948.500,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 44
Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 45.389.500	Rp 82.929.100	(45,27)
Beban Persediaan bahan baku	Rp -	Rp -	-
Beban persediaan lainnya	Rp 44.115.500	Rp 79.019.400	(44)
Jumlah	Rp 89.505.000	Rp 161.948.500	(44,73)

Berdasarkan Tabel 44 diatas, Laporan Operasional – Beban Persediaan Periode 30 Juni 2025 mengalami realisasi *penurunan* sebesar Rp.72.443.500,00 atau 44,73 persen atas beban persediaan periode 30 Juni 2024.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2.394.233.970,00

Jumlah Beban Jasa periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp2.394.233.970,00 dan Rp5.319.938.455,00.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang/Jasa untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 45
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)
Belanja Keperluan Perkantoran	183.300.506	250.860.856	Rp (26,93)
Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	-	318.500	Rp (100,00)
Bel.Honor Operasional Satker	49.950.000	43.760.000	Rp 14,15
Bel.brg operasional lainnya	171.603.338	634.287.790	Rp (72,95)
Bel.brg operasional - Covid	-	-	#DIV/0!
Belanja Bahan	29.601.900	1.325.243.425	Rp (97,77)
Honor Terkait Output Kegiatan	1.055.800.000	1.364.600.000	Rp (22,63)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23.403.144	794.617.522	Rp (97,05)
Belanja Barang Non Operasional - Covid	-	-	Rp -
Belanja Langganan Listrik	160.655.585	219.865.511	Rp (26,93)
Belanja Langganan Telepon	-	-	Rp -
Bel. Langganan Daya dan Jasa Lainnya	127.764.000	99.573.000	Rp 28,31
Bel. Sewa	-	120.740.000	Rp (100,00)
Bel. Jasa Profesi	32.340.000	107.120.000	Rp (69,81)
Bel. Jasa Lainnya	559.815.497	358.951.851	Rp 55,96
Bel.Jasa - Covid 19	-	-	Rp -
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Jumlah	Rp 2.394.233.970	Rp 5.319.938.455	Rp (55,00)

Berdasarkan Tabel 45 diatas, Laporan Operasional – Beban Barang dan Jasa Periode 30 Juni 2022 mengalami *Kenaikan Rp1.509.261.752,00 atau 40.36 persen* atas beban barang dan jasa Periode 30 Juni 2023.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp213.644.093,00*

Beban Pemeliharaan Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp213.644.093,00 dan Rp1.263.039.510,00.

Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang maksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ke kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 46
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 71.478.000	Rp 590.924.000	Rp (519.446.000)
Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 83.615.593	Rp 580.289.910	Rp (496.674.317)
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan	Rp 58.550.500	Rp 91.825.600	Rp (33.275.100)
Bel. Biaya Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
Bel. Persediaan untuk pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Belanja Bruto	Rp 213.644.093	Rp 1.263.039.510	Rp (1.049.395.417)
Jumlah Belanja Neto	Rp 213.644.093	Rp 1.263.039.510	Rp (1.049.395.417)

Berdasarkan Tabel 46 diatas, Laporan Operasional – Beban Pemeliharaan Periode 30 Juni 2022 mengalami *kenaikan Rp423.432.497,00* atau 51,56 persen atas beban pemeliharaan Periode 30 Juni 2023. Hal tersebut karena beban suku cadang dan beban persediaan untuk pemeliharaan tidak mengalami realisasi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp10.919.978,00

Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp10.919.978,00 dan Rp1.734.241.923,00 .

Beban tersebut adalah merupakan Beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 47
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/ (Turun) %
Bel. Perjalanan Biasa	Rp 10.919.978	Rp 802.883.232	(98,64)
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	Rp -	Rp 7.500.000	(100,00)
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota	Rp -	Rp 923.858.700	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 10.919.978	Rp 1.734.241.932	(99,37)
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Neto	Rp 10.919.978	Rp 1.734.241.932	(99,37)

Berdasarkan Tabel 47 diatas, Laporan Operasional – Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2025 mengalami *penurunan* senilai Rp1.723.321.954,00 atau 99,37*persen* atas beban perjalanan dinas Periode 30 Juni 2024.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp777.036.586,00

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp777.036.586,00 dan Rp796.107.141,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat Alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat Ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian beban Penyusutan dan amortisasi Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 48
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 425.366.993	Rp 450.883.568	0%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 295.154.854	Rp 293.239.620	
Beban Penyusutan jalan dan Jembatan	Rp 30.441.225	Rp 27.805.419	
Beban Penyusutan Irigasi	Rp 2.823.704	Rp 2.823.704	
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 21.354.830	Rp 21.354.830	
Beban peny. Properti investasi	Rp 1.894.980	Rp -	
Jumlah Penyusutan	Rp 777.036.586	Rp 796.107.141	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			
Beban Penyusutan Aset lain-lain	Rp -	Rp -	
Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp -	
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	Rp 777.036.586	Rp 796.107.141	85,33

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp(0,00).

D.9. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar Rp0,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian atas pelepasan aset tanah milik BPPP Ambon yang dihibahkan.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

D.10. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ Defisit dari
kegiatan non operasional
RP.29,00

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya terdiri dari pendapatan yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah senilai Rp.29,00 dan Rp.825.408,00.

Rincian Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 49
Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pengembalian belanja pegawai	Rp 29	Rp 408	(92,89)
Pengembalian belanja barang	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Pengembalian belanja barang	Rp -	Rp -	-
Pelepasan aset	Rp -	Rp 825.000	
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp 29	Rp 825.408	(100,00)

Sesuai Tabel 49, Saldo Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya senilai Rp29,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu berupa pengembalian pembulatan.

D.11. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa
Rp0,00

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Pos luar biasa Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

D.12. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
Rp(27.895.413.943,00)

Surplus/Defisit LO Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp(27.895.413.943,00) dan Rp(34.590.393.877,00).

Nilai Surplus/Defisit LO ini harus sama nilainya dengan Surplus/Defisit – LO yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp55.334.451.791,00

Nilai ekuitas pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp55.334.451.791,00 dan Rp55.510.254.295,00.

Ekuitas periode 30 Juni 2025 ini mengalami *penurunan* senilai Rp175.802.504,00 dari Ekuitas periode 30 Juni 2024.

Nilai ekuitas awal di Tahun 2025 ini harus merupakan nilai yang sama pada ekuitas akhir di Tahun 2024.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(27.895.413.943,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah senilai Rp(27.895.413.943,00) dan Rp(34.590.393.877,00).

Surplus (Defisit) LO periode 30 Juni 2025 ini mengalami *penurunan* senilai Rp6.694.979.934,00 dari Surplus (Defisit) LO periode 30 Juni 2024.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dengan surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi nilai persediaan
Rp0,00

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp(0,00)*

E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap adalah koreksi atas reklasifikasi aset Tanah. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp(0,00) dan (Rp0,00).

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,00*

Koreksi nilai Perolehan Aset Tetap non Revaluasi merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset tanah pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi asset yang diakibatkan adanya penyusutan amortisasi. Dimana aset yang nilai bukunya sudah nol tidak bisa dilakukan koreksi.

E.6. Koreksi Atas Beban

*Koreksi Atas
Beban Rp0,00*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan yang terjadi pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

E.7. Koreksi Atas Pendapatan

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0,00*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi atas periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas Pendapatan Periode periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp25.621.130.741,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp25.621.130.741,00 dan Rp32.872.711.101,00.

Transaksi Antar Entitas periode 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan senilai Rp7.251.580.360 dari Transaksi Antar Entitas periode 30 Juni 2024.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 50
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.151.377.749
Diterima dari Entitas Lain	(530.247.008)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	25.621.130.741

Berdasarkan tabel 50 diatas, diketahui bahwa transaksi antar entitas – ditagihkan ke entitas lain senilai Rp26.151.377.749,00 merupakan total realisasi anggaran belanja periode Semester I TA. 2025; sedangkan transaksi antar entitas – diterima dari entitas lain senilai Rp530.247.008,00 merupakan total penerimaan pendapatan Negara dan hibah periode Semester I TA. 2025.

Ekuitas Akhir
Rp53.060.168.589,00

E.9. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp53.060.168.589,00 dan Rp53.792.571.519,00.

Ekuitas Akhir periode 30 Juni 2025 ini mengalami *kenaikan* senilai Rp732.402.930,00 dari Ekuitas Akhir periode 30 Juni 2024.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

❖ BPPP AMBON

- I. Terdapat temuan BPK yaitu Pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia
- II. Rekapitulasi Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2025. Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sesuai SK KPA Nomor: KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020, dan SK Kepala Balai Keputusan Selaku Kausa Pengguna Anggaran BPPP Ambon Nomor : B.77/BPPP.AMB/KU.110/I/2025 dan Nomor: Tanggal 02 Januari 2025 dan B.76/BPPP.AMB/KU.110/I/2025 dan Nomor: Tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan KKP

Adapun Formasi Pejabat Perbendaharaan BPPP Ambon adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Abubakar, S.St.Pi, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Rahmawati Umasugi, S.Pi,M.Si
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Rachel L. Wattimena,S.Pi,M.Si
Bendahara Pengeluaran	:	Della N. Latuihamallo, A.Md
Bendahara Penerimaan	:	Hartati Rima

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	532,216,686	292,826,838	239,389,848	81.751
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	532,216,686	292,826,838	239,389,848	81.751
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	532,216,686	292,826,838	239,389,848	81.751
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	24,942,291,031	25,608,770,585	(666,479,554)	(2.603)
Beban Persediaan	89,505,000	161,948,500	(72,443,500)	(44.732)
Beban Barang dan Jasa	2,394,233,970	5,319,938,455	(2,925,704,485)	(54.995)
Beban Pemeliharaan	213,644,093	1,263,039,510	(1,049,395,417)	(83.085)
Beban Perjalanan Dinas	10,919,978	1,734,241,932	(1,723,321,954)	(99.37)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	777,036,586	796,107,141	(19,070,555)	(2.395)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	28,427,630,658	34,884,046,123	(6,456,415,465)	(18.508)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,895,413,972)	(34,591,219,285)	6,695,805,313	(19.357)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	825,000	(825,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	825,000	(825,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29	408	(379)	(92.892)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29	408	(379)	(92.892)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	29	825,408	(825,379)	(99.996)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(27,895,413,943)	(34,590,393,877)	6,694,979,934	(19.355)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(27,895,413,943)	(34,590,393,877)	6,694,979,934	(19.355)

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 197804272003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	55,334,451,791	55,510,254,295	(175,802,504)	(0.32)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(27,895,413,943)	(34,590,393,877)	6,694,979,934	(19.36)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	25,621,130,741	32,872,711,101	(7,251,580,360)	(22.06)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,274,283,202)	(1,717,682,776)	(556,600,426)	32.4
EKUITAS AKHIR	53,060,168,589	53,792,571,519	(732,402,930)	(1.36)

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 197804272003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON 238755

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	52,988,789,000	26,151,377,749	(26,837,411,251)	49.35	67,500,343,000	33,164,623,523	(34,335,719,477)	49.13
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
 NIP 197804272003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 238755
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN MALUKU
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/25 6:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/25 2:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,435,640,000	13,435,640,000	8,080,826,000	0	8,080,826,000	60.14	5,354,814,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	209,000	209,000	118,455	0	118,455	56.68	90,545
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	865,300,000	865,300,000	545,095,910	0	545,095,910	63	320,204,090
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	306,000,000	306,000,000	172,850,598	0	172,850,598	56.49	133,149,402
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	17,640,000	10,080,000	0	10,080,000	57.14	7,560,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,417,535,000	1,417,535,000	1,358,996,000	0	1,358,996,000	95.87	58,539,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	122,800,000	122,800,000	120,515,632	0	120,515,632	98.14	2,284,368
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	685,000,000	685,000,000	440,386,020	0	440,386,020	64.29	244,613,980
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,647,592,000	1,647,592,000	895,263,000	0	895,263,000	54.34	752,329,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,200,000	70,200,000	34,125,000	0	34,125,000	48.61	36,075,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	576,900,000	576,900,000	281,625,000	0	281,625,000	48.82	295,275,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	52,020,000	52,020,000	31,745,000	185,000	31,560,000	60.67	20,460,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,196,836,000	19,196,836,000	11,971,626,615	185,000	11,971,441,615	62.36	7,225,394,385
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,100,000,000	1,100,000,000	435,689,600	0	435,689,600	39.61	664,310,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,000	32,000	9,030	0	9,030	28.22	22,970
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	87,000,000	87,000,000	21,784,480	0	21,784,480	25.04	65,215,520
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,900,000	22,900,000	4,869,472	0	4,869,472	21.26	18,030,528
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	222,000,000	222,000,000	73,440,000	0	73,440,000	33.08	148,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	78,000,000	78,000,000	20,277,600	0	20,277,600	26	57,722,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	293,000,000	293,000,000	56,388,000	0	56,388,000	19.25	236,612,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,802,932,000	1,802,932,000	612,458,182	0	612,458,182	33.97	1,190,473,818
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	19,155,572,000	19,155,572,000	10,357,626,282	0	10,357,626,282	54.07	8,797,945,718
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,000,000,000	2,000,000,000	550,730,211	0	550,730,211	27.54	1,449,269,789
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	21,155,572,000	21,155,572,000	10,908,356,493	0	10,908,356,493	51.56	10,247,215,507
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	42,155,340,000	42,155,340,000	23,492,441,290	185,000	23,492,256,290	55.73	18,663,083,710
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	520,561,000	304,860,000	183,300,506	0	183,300,506	60.13	121,559,494
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	108,216,000	119,880,000	49,950,000	0	49,950,000	41.67	69,930,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,826,445,000	271,832,000	171,603,338	0	171,603,338	63.13	100,228,662

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 238755
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN MALUKU
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 16/07/25 6:05 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 16/7/25 2:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,457,622,000	696,572,000	404,853,844	0	404,853,844	58.12	291,718,156
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,314,638,000	321,662,000	29,601,900	0	29,601,900	9.2	292,060,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	454,000,000	1,766,200,000	1,055,800,000	0	1,055,800,000	59.78	710,400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,124,870,000	5,197,120,000	23,403,144	0	23,403,144	0.45	5,173,716,856
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,893,508,000	7,284,982,000	1,108,805,044	0	1,108,805,044	15.22	6,176,176,956
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,000,000	17,200,000	13,200,000	0	13,200,000	76.74	4,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,000,000	17,200,000	13,200,000	0	13,200,000	76.74	4,000,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	492,000,000	476,750,000	200,026,700	0	200,026,700	41.96	276,723,300
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	0	0	0	0	0	0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	192,000,000	190,146,000	127,764,000	0	127,764,000	67.19	62,382,000
522141	Belanja Sewa	80,000,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	349,700,000	242,940,000	32,340,000	0	32,340,000	13.31	210,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	932,603,000	1,084,733,000	547,567,800	0	547,567,800	50.48	537,165,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,047,503,000	1,994,569,000	907,698,500	0	907,698,500	45.51	1,086,870,500
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	875,979,000	71,484,000	71,478,000	0	71,478,000	99.99	6,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	903,631,000	120,829,000	83,615,593	0	83,615,593	69.2	37,213,407
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	235,200,000	111,631,000	58,550,500	0	58,550,500	52.45	53,080,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,014,810,000	303,944,000	213,644,093	0	213,644,093	70.29	90,299,907
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	466,182,000	466,182,000	10,919,978	0	10,919,978	2.34	455,262,022
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482,400,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	950,082,000	466,182,000	10,919,978	0	10,919,978	2.34	455,262,022
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,423,525,000	10,763,449,000	2,659,121,459	0	2,659,121,459	24.71	8,104,327,541
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 238755
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
MALUKU
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 16/07/25 6:05 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 16/7/25 2:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	53,648,865,000	52,988,789,000	26,151,562,749	185,000	26,151,377,749	49.35	26,837,411,251

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 238755

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
MALUKU
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/07/25 6:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	57,100,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	95,334,000	5,736,000	0	5,736,000	6.02
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744	0	395,775,744	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	75,994,000	120,819,720	0	120,819,720	158.99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	228,428,000	522,331,464	0	522,331,464	228.66
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	590,400,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	590,400,000	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	7,915,515	0	7,915,515	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	7,915,515	0	7,915,515	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29	0	29	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	29	0	29	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	818,828,000	530,247,008	0	530,247,008	64.76
	JUMLAH PENDAPATAN	818,828,000	530,247,008	0	530,247,008	64.76

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	100,770,000	0	100,770,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	1,430,455,684	1,428,485,977	1,969,707	0.14
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,428,485,977)	(1,428,485,977)	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,969,707	0	1,969,707	0.00
Persediaan	52,316,500	128,621,500	(76,305,000)	(59.33)
JUMLAH ASET LANCAR	155,056,207	128,621,500	26,434,707	20.55
ASET TETAP				
Tanah	30,850,343,000	30,850,343,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	126,044,594,217	126,044,594,217	0	0.00
Gedung dan Bangunan	23,423,281,969	23,423,281,969	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,032,905,962	8,032,905,962	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	155,769,275	155,769,275	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(134,211,172,783)	(133,436,031,177)	(775,141,606)	0.58
JUMLAH ASET TETAP	54,295,721,640	55,070,863,246	(775,141,606)	(1.41)
Properti Investasi				
Properti Investasi	189,498,000	189,498,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(17,054,820)	(15,159,840)	(1,894,980)	12.50
JUMLAH Properti Investasi	172,443,180	174,338,160	(1,894,980)	(1.09)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	237,928,680	237,928,680	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(237,928,680)	(237,928,680)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	54,623,221,027	55,373,822,906	(750,601,879)	(1.36)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,450,034,741	39,371,115	1,410,663,626	3,582.99
Utang Yang Belum Ditagihkan	12,247,697	0	12,247,697	0.00
Uang Muka dari KPPN	100,770,000	0	100,770,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,563,052,438	39,371,115	1,523,681,323	3,870.05
JUMLAH KEWAJIBAN	1,563,052,438	39,371,115	1,523,681,323	3,870.05
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	53,060,168,589	55,334,451,791	(2,274,283,202)	(4.11)
JUMLAH EKUITAS	53,060,168,589	55,334,451,791	(2,274,283,202)	(4.11)
JUMLAH EKUITAS	53,060,168,589	55,334,451,791	(2,274,283,202)	(4.11)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

**SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON**

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:03 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54,623,221,027	55,373,822,906	(750,601,879)	(1.36)

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 197804272003121001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
 UNIT ORGANISASI : 12
 WILAYAH/PROVINSI : 2100
 SATUAN KERJA : 238755

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 MALUKU
 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Tgl. Cetak 16/07/2025 6:06 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,428,485,977	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,428,485,977
0.0	117111	Barang Konsumsi	36,262,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	92,359,500	0
0.0	131111	Tanah	30,850,343,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	126,044,594,217	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	23,423,281,969	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,135,707,710	0
0.0	134112	Irigasi	295,875,000	0
0.0	134113	Jaringan	601,323,252	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	155,769,275	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	124,061,016,974
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,222,631,505
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,791,733,372
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	101,980,865
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	257,718,461
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	950,000
0.0	138311	Properti Investasi	189,498,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	15,159,840
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	237,928,680	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	237,928,680
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	39,371,115
0.0	391111	Ekuitas	0	55,334,451,791
JUMLAH			190,491,428,580	190,491,428,580

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,770,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,430,455,684	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,428,485,977
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,872,500	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	49,444,000	0
0.0	131111	Tanah	30,850,343,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	126,044,594,217	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	23,423,281,969	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,135,707,710	0
0.0	134112	Irigasi	295,875,000	0
0.0	134113	Jaringan	601,323,252	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	155,769,275	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	124,486,383,967
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,517,786,359
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,822,174,597
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	104,804,569
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	279,073,291
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	950,000
0.0	138311	Properti Investasi	189,498,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	17,054,820
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	237,928,680	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	237,928,680
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,450,034,741
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	12,247,697
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,770,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	26,151,377,749
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	530,247,008	0
0.0	391111	Ekuitas	0	55,334,451,791
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,736,000
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	122,789,427
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	7,915,515
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	9,090,626,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	132,855	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	612,740,500	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	194,228,532	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	11,340,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,526,629,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	122,131,290	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	494,990,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	895,263,000	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	39,725,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	328,100,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,795,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	490,150,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,269	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,667,720	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,510,192	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	82,620,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	22,884,720	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	56,388,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	10,357,626,282	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	550,730,211	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	183,300,506	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,950,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	171,603,338	0
3.0	521211	Beban Bahan	29,601,900	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,055,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	23,403,144	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	160,655,585	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	127,764,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	32,340,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	559,815,497	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,478,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,615,593	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	58,550,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,919,978	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	425,366,993	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	295,154,854	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	30,441,225	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,823,704	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	21,354,830	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	1,894,980	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	45,389,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	44,115,500	0
JUMLAH			219,475,740,953	219,475,740,953

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 197804272003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	26,151,377,749
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	530,247,008	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,736,000
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	120,819,720
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	7,915,515
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,080,826,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	118,455	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	545,095,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	172,850,598	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	10,080,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,358,996,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	120,515,632	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	440,386,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	895,263,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	34,125,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	281,625,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	31,745,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	435,689,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,030	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	21,784,480	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,869,472	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	73,440,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,277,600	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	56,388,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	10,357,626,282	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	550,730,211	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	183,300,506	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,950,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	171,603,338	0
3.0	521211	Belanja Bahan	29,601,900	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,055,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23,403,144	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,200,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	200,026,700	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	127,764,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	32,340,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 6:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	547,567,800	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,478,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,615,593	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	58,550,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,919,978	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			26,681,809,757	26,681,809,757

Keterangan :

FINAL

Ambon, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

197804272003121001